

# LAPORAN KEGIATAN

---

## FOCUS GROUP DISCUSSION

### “Transformasi Kampanye Politik Untuk Pemilu 2024”



**Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Oktober 2023**

## PENDAHULUAN

Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan salah satu kegiatan politik yang paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat sehingga pemilu menjadi momen pendidikan politik yang sangat penting dalam rangka mendewasakan warga negara. Pemilu mengajarkan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Pemilu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Fungsi pemilu menurut Arbi Sanit adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik.

Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan “*qonditio sine qua non*”, the one can not exist without the others. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.<sup>1</sup> Pemilu hanyalah instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Penentuan suatu pilihan harus melewati banyak penelaahan pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik buruknya pilihan itu sendiri.

Agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, maka pemilu sudah seharusnya diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak. Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, kode

etik dan tata tertib KPU. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu. Menurut Herbert Hyman, Sosialisasi politik merupakan suatu proses penyerapan nilai dari lingkungan sistem politik ataupun dari masyarakat terhadap individu atau terhadap masyarakat secara keseluruhan. Proses sosialisasi politik ini berlangsung secara terus menerus selama orang itu hidup. Pemilu memiliki serangkaian proses dimana salah satunya yaitu kegiatan kampanye.

Perkembangan media sosial berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek politik. Perkembangan media sosial di dunia politik terlihat dalam kampanye politik di sejumlah negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye diawali dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Tahun 2012. Keenam pasangan kandidat yang bersaing secara intensif menggunakan media sosial. Pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenangkan Pilkada dengan melakukan kampanye melalui video di YouTube dan akun Twitter, serta Facebook. Penggunaan media sosial memungkinkan pasangan kandidat menjangkau jutaan pemilih, terutama kaum muda (Picard and Chang, 2014).

Selain dampak positif tersebut, muncul efek negatif dari penggunaan media sosial dalam kampanye yang ditandai dengan penyebaran hoaks yang secara masif menyerang langsung kandidat (Utami, 2019). Berdasarkan kerangka regulasi istilah hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Istilah yang digunakan dalam kerangka regulasi yaitu berita atau informasi bohong. Hal ini seperti dijelaskan dalam pedoman implementasi Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang salah satunya dijelaskan bahwa berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem

elektronik.

Isu utama yang digunakan dalam pembuatan hoaks adalah isu identitas berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) (Aspinall dan Mietzner, 2014). Penyebaran hoaks dengan menggunakan isu SARA hingga politik identitas merupakan bagian dari kampanye hitam (black campaign). Hal ini terjadi pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019, hingga Pilkada Serentak tahun 2020.

Sehingga saat ini telah banyak transformasi politik menuju pemilihan umum tahun 2024. Dengan adanya hal tersebut maka Laboratorium Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik Program Studi Administrasi Publik Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Transformasi Kampanye Politik Untuk Pemilihan Umum 2024”

## **TUJUAN**

- Memberikan wawasan dan pengetahuan terkait Transformasi Kampanye Politik Untuk Pemilihan Umum 2024 kepada Asisten Laboratorium di Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

## **MEDIA DAN WAKTU KEGIATAN**

- Hari, Tanggal : Jum'at, 19 Oktober 2023
- Waktu : 13.00 WIB - Selesai
- Media : Offline
- Tempat : Laboratorium Governance dan Manajemen Pelayanan Publik
- Biaya : Free
- Fasilitas : Ilmu yang bermanfaat

## **PESERTA FGD**

*Focus Group Discussion* (FGD) diikuti oleh Asisten Laboratorium dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

## PEMBICARA

1. Nanang Haromin, S.Sos (Pengamat Politik)
2. Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si (Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media Umsida)

## SUSUNAN KEGIATAN

1. Pembukaan
2. Penyampaian Materi
3. Tanya Jawab (Sharing)
4. Penutup

## PENUTUP



Demikian proposal kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) kami buat, agardapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 19 Oktober 2023  
Ketua Program Studi  
Administrasi Publik



ILMI USROTIN C, M.AP

Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial



POPPY FEBRIANA, S.Sos., M.Med.Kom

## **Lampiran Susunan Kepanitiaan**

**Pengarah** : Poppy Febriana, S.Sos., M.Med.Kom  
**Penanggung Jawab** : Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

### **SUSUNAN PANITIA**

**Ketua Pelaksana** : Dicky Aulia Rohman  
**Sekretaris** : Laila Ihza Masithah  
**Bendahara** : Hana Farasastin, S.AP  
**Co. Acara** : Tiara Agustin  
Widya Kristanti  
**Co. Publikasi & Promosi** : M. Aditya Trio Jatmiko  
Renanda Ayu Pramesti  
**Co.IT** : Alfin Azrial Akbar

## Lampiran Dokumentasi









